

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN PROPOSISI

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dibutuhkan untuk memperjelas, menegaskan, melihat kelebihan dan kelemahan berbagai teori yang digunakan penulis lain dalam penelitian atau pembahasan masalah yang sama. Selain itu, penelitian terdahulu perlu disebutkan dalam sebuah penelitian untuk memudahkan pembaca melihat dan membandingkan perbedaan teori yang digunakan oleh penulis dengan peneliti yang lain dalam melakukan pembahasan masalah yang sama. Adapun penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

2.1.1. Penelitian Peneliti

Judul Penelitian	: Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Wisata Unggulan Pariwisata Kelas Dunia di Jawa Barat (Studi Kasus Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Kuningan)
Variabel/Konsep Penelitian	: Implementasi kebijakan
Tema Penelitian	: Pengembangan pariwisata
Metode Penelitian yang digunakan	: Metode kualitatif
Teori yang digunakan	: Teori Van Meter dan Van Horn
Produk/ <i>Output</i> Penelitian	: Saran/Rekomendasi

2.1.2. Perbandingan dengan Penelitian Sebelumnya

Penelitian tentang implementasi kebijakan pengembangan pariwisata telah beberapa kali dilakukan, baik dari sudut pandang ilmu administrasi publik, dan ekonomi. Oleh karena itu, untuk mengawali penelitian ini, ada beberapa kajian pustaka yang relevan dengan tema penelitian peneliti di atas. Hal ini penting untuk mengambil *entry point* penelitian, positioning penelitian serta perbedaan dengan penelitian terdahulu. Beberapa penelitian sebelumnya adalah:

Tabel 2.1.
Penelitian Sebelumnya
Sumber: Olahan Penulis Tahun 2025

No.	Penelitian Sebelumnya	Persamaan dengan Penelitian Peneliti	Perbedaan dengan Penelitian Peneliti
1.	Judul: “Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat desa Srikaton tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan” Peneliti: Bagas Mawardi (2024)	• Variabel/Konsep penelitian yaitu implementasi kebijakan • Tema penelitian yaitu Pengembangan Pariwisata • Menggunakan metode penelitian kualitatif • Produk/Output penelitian berupa saran/rekomendasi	Penelitian sebelumnya: • Lokasi penelitian di Kab. Lampung Selatan • Menggunakan teori implementasi kebijakan dari Grindle (1980)
2.	Judul: “Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Bulukamba” Peneliti: Andi Iqra Syamsul Bahari (2023)	• Variabel/Konsep penelitian yaitu implementasi kebijakan • Tema penelitian yaitu Pengembangan Wisata • Menggunakan metode penelitian kualitatif • Produk/<i>Output</i> penelitian berupa saran/rekomendasi	Penelitian sebelumnya: • Lokasi penelitian di Kab. Bulukamba • Menggunakan teori implementasi kebijakan dari Edward III (1980)
3.	Judul: “Implementasi Kebijakan Strategi Pengembangan Kepariwisataaan Pada Dinas Pariwisata Kabupaten Labuhan Batu	• Variable/Konsep penelitian yaitu implementasi kebijakan • Tema penelitian yaitu Pengembangan Kepariwisataaan • Menggunakan metode penelitian kualitatif	Penelitian sebelumnya: • Lokasi penelitian di Labuhan Batu Selatan • Menggunakan teori implementasi kebijakan dari Edward III (1980)

	Selatan” Peneliti: Fengky Aryo Aritonang (2023)	• Produk/<i>Output</i> penelitian berupa saran/rekomendasi	
4.	Judul: “Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Bau-Bau” Peneliti: La Ode Zaina F Aziz, Bahtiar, La Ode Mustafa (2022)	• Variable/Konsep penelitian yaitu implementasi kebijakan • Tema penelitian yaitu Pengembangan Kepariwisata • Menggunakan metode penelitian kualitatif • Produk/<i>Output</i> penelitian berupa saran/rekomendasi	Penelitian sebelumnya: • Lokasi penelitian di Kota Bau-Bau • Menggunakan teori implementasi kebijakan dari Edward III (1980)
5.	Judul: “Implementasi Kebijakan Kepariwisata dalam Meningkatkan Perekonomian Daerah” (Studi Kasus Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi) Peneliti: Auliya Gaffar Rahman (2021)	• Variabel/Konsep penelitian yaitu implementasi kebijakan • Menggunakan metode penelitian kualitatif • Produk/<i>Output</i> penelitian berupa saran/rekomendasi	Penelitian sebelumnya: • Lokasi penelitian di Kab. Banyuwangi • Tema penelitian yaitu Peningkatan Perekonomian Daerah • Menggunakan teori implementasi kebijakan dari Grindle (1980)
6.	Judul: “Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Berbasis Pemberdayaan Masyarakat” Peneliti: Kariaman Sinaga, M. Amri Nasytion, Ayu Trisna Dewi (2021)	• Variabel/Konsep penelitian yaitu implementasi kebijakan • Menggunakan metode penelitian kualitatif • Tema penelitian yaitu Pengembangan Pariwisata • Produk/<i>Output</i> penelitian berupa saran/rekomendasi	Penelitian sebelumnya: • Lokasi penelitian di Kec. Pantai Cermin Kab. Serdang Bedagai Sumatera Utara • Menggunakan teori implementasi kebijakan dari Grindle (1980)
7.	Judul: “Implementasi Kebijakan Tentang Pengembangan Destinasi Wisata Situs Astana Gede Kawali Oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis”	• Variabel/Konsep penelitian yaitu implementasi kebijakan • Tema penelitian yaitu Pengembangan Wisata • Menggunakan metode penelitian kualitatif • Produk/<i>Output</i> penelitian berupa saran/rekomendasi	Penelitian sebelumnya: • Lokasi penelitian di Kabupaten Ciamis • Menggunakan teori implementasi kebijakan dari Edward III (1980)

	Peneliti: Dewi Silvia (2019)		
8.	Judul: “Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Kawasan Pantai Panjang Kota Bengkulu” Peneliti: Delly, Faizal Anwar, Novliza Eka Patrisia (2019)	• Variabel/Konsep penelitian yaitu implementasi kebijakan • Tema penelitian yaitu pengembangan pariwisata • Menggunakan metode penelitian kualitatif • Produk/<i>Output</i> penelitian berupa saran/rekomendasi	Penelitian sebelumnya: • Lokasi penelitian di Kota Bengkulu • Menggunakan teori implementasi kebijakan dari Edward III (1980)
9.	Judul: “Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Terhadap Peningkatan PAD Kota Padang” Peneliti: Yanti Hadya (2018)	• Variabel/Konsep penelitian yaitu implementasi kebijakan • Tema penelitian yaitu Pengembangan Wisata	Penelitian sebelumnya: • Menggunakan metode penelitian Kuantitatif • Lokasi penelitian di Kabupaten Padang • Menggunakan teori implementasi kebijakan dari Edward III (1980) • Produk/<i>Output</i> penelitian berupa strategi
10.	Judul: “Implementasi Kebijakan Pembangunan Pariwisata sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi)” Peneliti: Pandita dan Graha (2017)	• Variabel/Konsep penelitian yaitu implementasi kebijakan • Tema penelitian yaitu Pengembangan Wisata • Menggunakan metode penelitian kualitatif • Produk/<i>Output</i> penelitian berupa saran/rekomendasi	• Lokasi penelitian di Kabupaten Banyuwangi • Menggunakan teori implementasi kebijakan dari Mazmanian dan Sabatier

Dari ringkasan penelitian terdahulu, maka penelitian penulis tidak sama persis dengan penelitian terdahulu, sehingga penelitian penulis bersifat orisinal atau bukan plagiat dari penelitian terdahulu. Cukup kiranya memberikan gambaran bahwa peneliti mengenai “Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Wisata Unggulan Pariwisata Kelas Dunia di Jawa Barat” studi kasus

Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Kuningan perlu untuk diteliti, mengingat Kabupaten Kuningan adalah kabupaten yang konsisten dalam mengorkestrasi pengembangan pariwisata melalui beragam rangkaian kegiatan yang ada setiap tahunnya. Penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan kebijakan pariwisata mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 15 tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2025.

2.2. Kajian Pustaka

2.2.1. Kebijakan Publik

2.2.1.1. Pengertian Kebijakan Publik

Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno, 2008:146)

mendefinisikan kebijakan publik yaitu:

sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Chief J.O Udoji (dalam Abdoellah & Rusfiana, 2020:179)

mendefinisikan *Public Policy* sebagai suatu tindakan yang mengarah pada suatu tujuan tertentu yang di arahkan pada suatu masalah atau kelompok masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga negara.

Winarno (2016:19) dalam bukunya berjudul Kebijakan Publik Era Globalisasi Teori, Proses dan Studi Kasus Komperatif, berpendapat bawa: Secara, istilah kebijakan atau *policy* digunakan untuk merujuk perilaku

seseorang aktor (misalnya seseorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam bidang kegiatan tertentu. Dalam referensi yang sama Robert Eyestone yang dikutip oleh Winarno (2016:19) mengatakan bahwa “Secara luas kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya”. Sedangkan menurut Dye yang dikutip oleh Winarno (2016:19) mengatakan dengan tegas bahwa “Kebijakan publik adalah studi tentang apa yang dilakukan oleh pemerintah, mengapa pemerintah mengambil tindakan tersebut, dan apa akibat dari tindakan tersebut”.

Kebijakan publik didefinisikan sebagai tindakan pemerintah yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan masyarakat luas. Dalam bukunya berjudul Kebijakan Publik menekankan pentingnya proses, implementasi, dan evaluasi dalam kebijakan publik untuk memastikan efektivitasnya. (Dian Suluh Kusuma Dewi, 2022:2).

Dari beberapa teori tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa secara luas segala tindakan yang dilakukan oleh pemerintah adalah suatu kebijakan publik. Kemudian lebih spesifik dapat diartikan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian proses dari pengambilan keputusan hingga tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, dan setiap keputusan ataupun tindakan yang dilakukan memiliki dampaknya masing-masing.

2.2.1.2. Jenis-Jenis Kebijakan Publik

Menurut James Anderson (dalam Suharno, 2010:24-25) menyampaikan bahwa kategori kebijakan publik sebagai berikut:

- a. Kebijakan *Substantif* dan Kebijakan *Procedural*

Kebijakan *Substantif* merupakan kebijakan yang menyangkut dengan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah tersebut. Sedangkan kebijakan *Procedural* merupakan bagaimana kebijakan dijalankan.

b. Kebijakan *Distributive*, Kebijakan *Regulatori* dan Kebijakan *Redistributive*

Kebijakan *distributif* merupakan distribusi pelayanan atau pemanfaatan kepada masyarakat atau individu. Kebijakan *Regulatori* merupakan kebijakan yang berupa pembatasan atau pelarangan terhadap perilaku individu atau kelompok masyarakat. Kebijakan *redistributif* merupakan kebijakan yang mengatur alokasi kekayaan, pendapatan, pemilihan atau hak-hak diantara berbagai kelompok dalam masyarakat.

c. Kebijakan Material dan Kebijakan Simbolik

Kebijakan Material merupakan kebijakan yang memberikan keuntungan sumber daya secara detail pada kelompok sasaran. Sedangkan kebijakan simbolis merupakan kebijakan yang memberikan manfaat kepada kelompok sasaran.

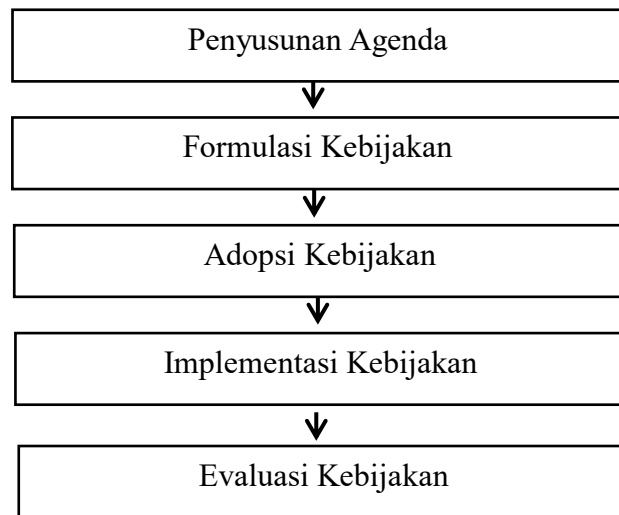
d. Kebijakan yang berhubungan dengan barang umum dan barang privat

Kebijakan barang umum merupakan kebijakan yang mengatur pemberian barang atau pelayanan publik. Sedangkan kebijakan barang privat merupakan kebijakan yang mengatur penyediaan barang atau pelayanan untuk pasar bebas.

2.2.1.3. Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan suatu proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus

dikaji didalamnya. Menurut William N. Dunn (dalam Winarno, 2016:31) menggambarkan bahwa tahapan-tahapan kebijakan publik adalah:



Gambar 2.1
Tahap-tahap Kebijakan Publik
Sumber: Winarno (2016:31)

Adapun beberapa penjelasan dari gambar di atas adalah, pertama; Penyusunan agenda adalah salah satu tahap menempatkan suatu permasalahan menjadi agenda publik yang dilakukan para pejabat. Dimana dalam penyusunan masalah-masalah yang dirumuskan telah diseleksi sebelumnya, dalam tahap ini terdapat suatu masalah yang mungkin tidak disentuh sama sekali namun juga terdapat suatu masalah lainnya yang ditetapkan dan menjadi fokus pembahasan. Kedua; dalam tahap formulasi kebijakan ini masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh pembuat kebijakan yang kemudian ditetapkan pemecahan masalah tersebut.

Ketiga; dalam tahap adopsi kebijakan ini dilakukan pemilihan dari sekian banyak pemecahan masalah atau alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, maka ditentukan salah satu alternatif kebijakan tersebut yang diadopsi dengan dukungan dari legislatif

yang berdasarkan konsensus bersama. Keempat; dalam tahap implementasi kebijakan ini keputusan program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan oleh badan administratif ataupun badan pemerintah lainnya. Karena bagaimanapun juga suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan para birokrat jika program yang telah dinuat tidak diimplementasikan. Dan kelima; tahap evaluasi kebijakan publik, dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai dan dievaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan suatu permasalahan tentunya dengan indikator tersendiri untuk menilai dan mengevaluasi suatu kebijakan tersebut.

2.2.2. Implementasi Kebijakan

2.2.2.1. Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi atau pelaksanaan kebijakan publik merupakan rangkaian kegiatan setelah suatu kebijakan dirumuskan. Tanpa suatu implementasi, suatu kebijakan yang telah dirumuskan akan sia-sia saja. Oleh karena itu, implementasi kebijakan mempunyai suatu kedudukan yang sangat penting di dalam kebijakan publik. (Abdoellah & Rusfiana, 2020:174).

Menurut Wrwan dan Dyah (2015:21) menyatakan bahwa:

Implementasi adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to delivery policy output*) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan. (Anisa & Arifin, 2021:25).

Van Meter dan van Horn dalam (Pallewa, 2016:4) mengatakan bahwa implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan

tujuan kebijakan publik untuk di realisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholder*). Selain itu, keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan syau implementasi kebijakan. Seriap tahapan implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan.

Dari beberapa pengerttian diatas, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan suatu bentuk tindakan yang akan berupa dengan keputusan yang telah diterapkan untuk menyelesaikan suatu masalah yang akan lebih menjamin disuatu hari nanti.

2.2.2.2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Van Meter dan Van Horn dalam Sepriati, Rosnidah dan Nursahidin (2023:130) mengidentifikasi enam variabel penting dalam implementasi kebijakan, diantaranya yaitu:

1. Standar dan Sasaran Kebijakan: kejelasan dan konsistensi tujuan sangat menentukan arah implementasi. Ketika tujuan kebijakan tidak jelas, maka pelaksanaan di lapangan akan mengalami kesulitan.
2. Sumber Daya: Implementasi kebijakan membutuhkan smber daya yang memadai, baik sumber daya manusia, anggaran, fasilitas maupun informasi.

3. Karakteristik Organisasi Pelaksana: Kemampuan, kepemimpinan, serta struktur organisasi pelaksana menentukan efektivitas pelaksanaan kebijakan.
4. Komunikasi Antar Organisasi: Koordinasi lintas sektor dan antar lembaga menjadi kunci dalam menghindari fragmentasi pelaksanaan.
5. Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik: Konteks lokal sangat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Kesenjangan sosial, dinamika politik lokal, dan budaya masyarakat dapat menjadi faktor pendukung atau penghambat.
6. Disposisi Pelaksana: Sikap dan komitmen pelaksana terhadap kebijakan sangat menentukan, apakah mereka mendukung atau justru menentang implementasi kebijakan tersebut.

Model ini sangat relevan dalam konteks penelitian ini karena memungkinkan untuk mengkaji sejauh mana kebijakan pengembangan Kawasan Wisata Unggulan (KWU) diimplementasikan secara efektif di Kabupaten Kuningan, dengan mempertimbangkan interaksi antara kebijakan, struktur organisasi dan lingkungan eksternal.

2.2.3. Pengembangan Pariwisata

2.2.3.1. Pengertian Pengembangan Pariwisata

Pengembangan pariwisata menurut undang-undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan yang menyatakan bahwa pemerintah bersama lembaga yang terkait dengan kepariwisataan menyelenggarakan penelitian dan pengembangan pariwisata (Pasal 11 UU No. 10 Tahun 2009).

Pengembangan pariwisata adalah suatu proses perencanaan strategis yang bertujuan untuk meningkatkan daya tarik suatu destinasi serta memberikan manfaat ekonomi, sosial dan budaya secara berkelanjutan. Menurut Inskeep (dalam Abdoellah & Rusfiana, 2020:35) pengembangan pariwisata mencakup kegiatan seperti perencanaan destinasi, pengelolaan kawasan wisata, pembangunan infrastruktur, pelibatan masyarakat serta promosi yang efektif.

Pengembangan pariwisata saat ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan kunjungan wisata dan pendekatan ekonomi, melainkan lebih diarahkan pada pendekatan berbasis keberlanjutan (*sustainability*), kewilayahan (*place-based development*), dan digitalisasi. Pengembangan pariwisata merupakan suatu proses strategis yang dilakukan secara sistematis dalam rangka mengelola, mengoptimalkan dan meningkatkan potensi sumber daya pariwisata secara berkelanjutan. Dalam pandangan Rojabi et al (2023) dalam buku Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata menjelaskan bahwa Pengembangan Pariwisata adalah proses perencanaan strategis yang melibatkan analisis potensi, pengembangan infrastruktur, pengelolaan lingkungan, serta strategi pemasaran dan promosi destinasi pariwisata.

Secara konseptual pengembangan pariwisata melibatkan upaya multi-level dan lintas sektor dalam merancang dan melaksanakan kebijakan, program, serta kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan daya tarik destinasi, memperluas lapangan kerja, mendorong investasi serta menciptakan nilai tambah bagi masyarakat dan pemerintah daerah. Oleh karena itu pengembangan pariwisata tidak dapat dipandang semata-

mata sebagai kegiatan ekonomi, melainkan sebagai strategi pembangunan wilayah berbasis potensi lokal yang berkelanjutan.

2.2.3.2. Prinsip-Prinsip Pengembangan Pariwisata

Konsep pengembangan pariwisata saat ini telah mengalami transformasi signifikan, terutama setelah diperkuat oleh paradigma sustainable development dalam dokumen-dokumen global seperti agenda 21 (UN, 1992) dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs). Menurut Organisasi Pariwisata Dunia (UNWTO, 2019) prinsip-prinsip dasar pengembangan pariwisata berkelanjutan meliputi:

- a. Pemanfaatan sumber daya secara optimal, yang mencakup pelestarian aset alam, budaya, dan sosial yang menjadi landasan utama keberlangsungan pariwisata.
- b. Peningkatan kualitas hidup masyarakat lokal, dengan memperluas akses terhadap peluang ekonomi, pendidikan dan partisipasi dalam pengambilan keputusan.
- c. Distribusi manfaat yang adil, baik secara ekonomi, sosial, maupun budaya untuk mencegah terjadinya ketimpangan antar pelaku atau antar wilayah.

Dalam pembangunan pariwisata di Kabupaten Kuningan, pendekatan pembangunan pariwisata berkelanjutan sangat penting, karena karakter wilayahnya yang memiliki kekayaan biodiversitas, nilai-nilai budaya tradisional yang masih ada serta ketergantungan terhadap ekosistem alam dalam mendukung destinasi wisata.

Seiring dengan berkembangnya dinamika global dan tantangan lokal, strategi pengembangan pariwisata kontemporer menekankan pada

pendekatan partisipatif, kolaboratif, dan berbasis teknologi. Berdasarkan kajian Novelli (2021), beberapa pendekatan yang kini banyak dilakukan oleh negara-negara berkembang maupun maju antar lain:

1. *Community-Based Tourism* (CBT): merupakan pendekatan yang menempatkan masyarakat lokal sebagai aktor utama dalam perencanaan, pengelolaan, dan pemanfaatan destinasi wisata. Pendekatan ini dinilai mampu memperkuat kemandirian komunitas, menjaga kelestarian budaya lokal, dan menciptakan pemerataan manfaat ekonomi.
2. *Eco-Cultural Tourism*: Pariwisata yang memadukan pelestarian alam dengan penguatan budaya lokal menjadi tren yang berkembang di berbagai destinasi. Pengembangan wisata berbasis taman konservasi, situs sejarah dan kearifan lokal menjadi pendorong munculnya destinasi yang unik dan autentik.
3. *Smart Tourism*: Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) menjadi aspek penting dalam pengembangan destinasi yang kompetitif. Konsep smart tourism mencakup penggunaan big data, *Internet of Things* (IoT), realitas virtual, serta aplikasi digital untuk meningkatkan pengalaman wisatawan, mempercepat pengambilan keputusan dan mengelola dampak lingkungan. Menurut Sigala (2020) menyebutkan bahwa digitalisasi telah menciptakan ekosistem baru dalam industri pariwisata yang menuntut kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur digital di tingkat lokal.

2.2.4. Kawasan Wisata Unggulan (KWU)

2.2.4.1. Pengertian Kawasan Wisata Unggulan (KWU)

Kawasan Wisata unggulan (KWU) merupakan strategi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mengelola dan mengembangkan pariwisata secara terfokus dan tematik. Model ini bertujuan untuk menjadikan kawasan-kawasan tertentu sebagai *center of excellence* pariwisata daerah serta menciptakan kawasan wisata berstandar kelas dunia yang mampu meningkatkan daya saing daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif serta sektor pendukung lainnya. KWU mengedepankan prinsip pengembangan tematik dan integratif, seperti wisata alam, budaya, sejarah, dan ekonomi kreatif dengan dukungan infrastruktur memadai serta jejaring kerja sama multipihak.

Dalam implementasinya strategi KWU dalam pengembangan pariwisata diantaranya:

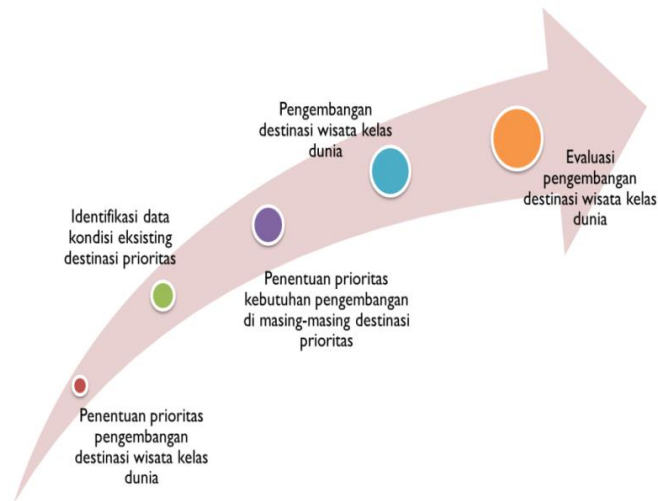
1. Penentuan lokasi strategis berdasarkan potensi unggulan daerah
2. Penguatan amenities dan aksesibilitas untuk meningkatkan kenyamanan wisatawan
3. Pelibatan masyarakat lokal dalam pengembangan destinasi
4. Penguatan promosi digital dan branding kawasan wisata

Kabupaten Kuningan merupakan salah satu wilayah yang termasuk dalam peta Kawasan Wisata Unggulan (KWU), dengan berbasis alam dan budaya. Strategi pengembangan KWU di Kabupaten Kuningan berorientasi pada wisata alam (ekowisata), wisata spiritual, dan wisata sejarah. Kawasan seperti Taman Nasional Gunung Ciremai, Situs Cipari dan Desa Wisata Cibuntu menjadi contoh dari titik-titik unggulan yang sedang dikembangkan.

2.2.4.2. Kawasan Wisata Unggulan Kelas Dunia

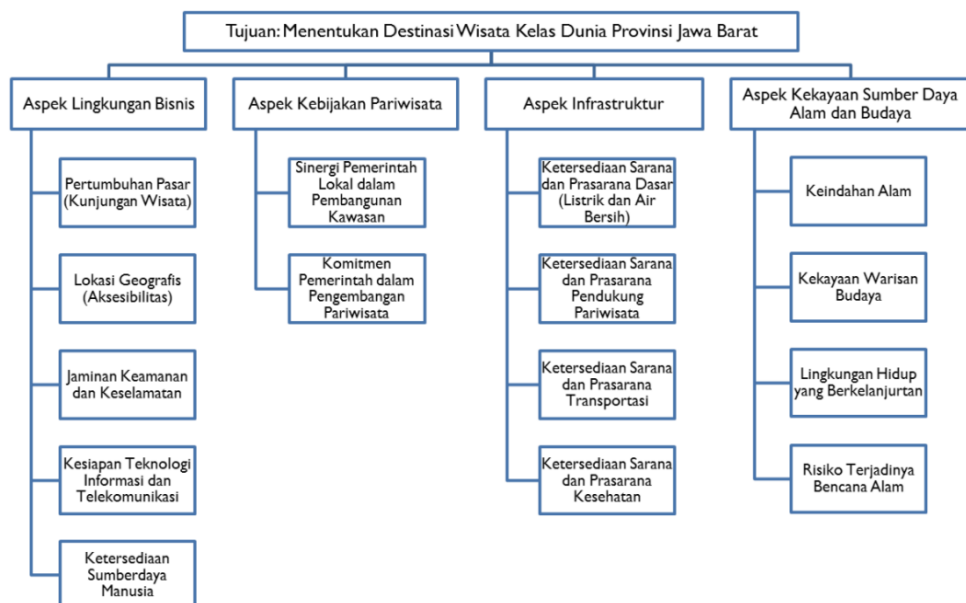
Kawasan Wisata Unggulan (KWU) Kelas Dunia merupakan destinasi wisata yang memiliki daya saing tinggi dan berkualitas kelas dunia, menjadikannya unggul dibandingkan destinasi lainnya secara nasional maupun internasional. Kawasan ini dikembangkan secara terstruktur untuk menarik wisatawan mancanegara, menciptakan peluang ekonomi, sosial, dan budaya, serta mampu bersaing dengan destinasi wisata global lainnya. Sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 9 ayat (1) RIPPAPROV Jawa barat tahun 2015-2025, destinasi pariwisata kelas dunia adalah destinasi yang mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif dibandingkan dengan destinasi pariwisata yang ada di berbagai belahan dunia yang lain. Selain itu destinasi yang dikunjungi tidak hanya oleh wisatawan nusantara akan tetapi juga dikunjungi oleh wisatawan mancanegara.

Road Map pengembangan destinasi kelas dunia Provinsi Jawa Barat disusun berdasarkan 5 (lima) tahapan. Pertama, penentuan prioritas pengembangan destinasi wisata kelas dunia yang dimulai tahun 2016 melalui kajian oleh tim konsultasi SBM ITB yang didukung oleh narasumber dari pihak terkait. Kedua, identifikasi data kondisi eksisting destinasi prioritas. Ketiga adalah penentuan prioritas kebutuhan pengembangan di masing-masing destinasi prioritas. Keempat adalah pengembangan destinasi wisata kelas dunia. Kelima adalah evaluasi pengembangan destinasi wisata kelas dunia. Tahap 1-3 dilaksanakan pada tahun 2016, sedangkan implementasi pengembangan dilakukan untuk 2017-2025.



Gambar 2.2
Tahap Pengembangan Destinasi Wisata Kelas Dunia Provinsi Jawa Barat
Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Jawa Barat

Pada penentuan daya saing kawasan pariwisata dunia digunakan 4 (empat) indikator/kriteria besar yaitu: aspek lingkungan bisnis, aspek kebijakan pariwisata, aspek infrastruktur, aspek kekayaan sumber daya alam dan budaya. Masing-masing aspek tersebut memiliki faktor-faktor penentu masing-masing. Indikator/kriteria utama beserta turunannya dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.3
Kriteria Pengembangan Destinasi Wisata Kelas Dunia Prov. Jabar
Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Prov. Jabar

2.2.4.3. Kawasan Wisata Unggulan Budaya Cirebon Raya

Kawasan wisata pesisir di jalur utara ini mencakup Kabupaten dan Kota Cirebon, sebagian kawasan Indramayu, dan sebagian Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Kuningan bagian utara dengan karakteristik kawasan pesisir dan kegiatan perikanan-pertanian. Kawasan ini memiliki lokasi yang strategis sebagai pengembangan pariwisata. Selain merupakan salah satu pintu gerbang Jawa Barat dari arah timur pulau jawa, kawasan ini juga terletak di jalur pantai utara (pantura) yang sangat padat dilalui pelaku perjalanan pada saat-saat tertentu, terutama menjelang hari lebaran. Lokasi kawasan yang strategis ini sangat berpotensi dalam menarik wisatawan dari Jawa Tengah dan Jawa Timur, terlebih ditunjang dengan kemudahan aksesibilitas darat, yaitu pengembangan jalan tol di Cirebon dan peningkatan pelayanan kereta api dari Jakarta, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Keberadaan jalan tol di Plumbon dan Palimanan juga semakin mempermudah aksesibilitas di antara kota/kabupaten, apalagi sudah adanya jalan tol yang menghubungkan Jakarta, Bandung dengan Dawuan, adanya bandara Internasional di Kertajati-Majalengka yang tentunya akan menyediakan infrastruktur yang sesuai standar.

Daya tarik wisata kawasan ini di dominasi oleh daya tarik budaya terutama yang terkait dengan budaya pesisir dan sejarah penyebaran agama islam di Jawa Barat, serta daya tarik alam pertanian pegunungan di Majalengka dan Kuningan. Daya tarik wisata budaya sejarah islam yang menjadi unggulan antara lain Makam Sunan Gunung Jati, Keraton Kasepuhan, Kanoman dan Kacirebonan serta Taman Air Gua Sunyaragi. Selain sejarah penyebaran agama islam, terdapat gedung bersejarah tempat berlangsungnya perjanjian Linggajati antara Pemerintah Indonesia dengan Belanda.

Daya tarik wisata alam serta budaya bercocok tanam masyarakatnya yang khas masyarakat pegunungan tradisional priangan merupakan daya tarik kawasan di bagian tengah selatan, yaitu Majalengka dan Kuningan. Sumber daya alam lain yang menjadi daya tarik wisata adalah pemandian air panas Sangkanurip Alami dan Gunung Ciremai di Kabupaten Kuningan, serta Curug Muara Jaya dan Wisata Agro Lemah Sugih, Bukit Panyaweuyan di Kabupaten Majalengka.

Pasar wisatawan di kawasan ini pada umumnya adalah wisatawan lokal dan regional Jabar Timur. Kegiatan wisata di kawasan ini cenderung terjadi intra kawasan. Promosi dan pemasaran belum difokuskan pada pasar wisatawan Internasional, namun sementara masih terbatas pada pasar wisata lokal dan regional untuk kegiatan rekreasi dan ziarah. Dalam pengembangan pariwisata di kawasan ini, konsep pembangunan pariwisata yang berbudaya harus menjadi acuan. Dengan konsep ini, pariwisata diharapkan dapat menunjukkan jati diri masyarakat Jawa barat yang berbudaya dan agamis.

2.2.4.4. Kawasan Wisata Unggulan Kabupaten Kuningan

Kabupaten Kuningan merupakan salah satu daerah strategis dalam pengembangan pariwisata Provinsi Jawa Barat yang telah ditetapkan sebagai bagian dari program Model Pengembangan Kawasan Wisata Unggulan (KWU) oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Penetapan ini mempertimbangkan kekayaan alam, potensi budaya, kesiapan infrastruktur, serta peran aktif masyarakat dalam mendukung pariwisata yang berkelanjutan. Dalam konteks kebijakan pembangunan pariwisata kelas dunia, kawasan wisata unggulan di Kabupaten Kuningan berperan sebagai motor utama dalam meningkatkan daya

saing daerah, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, serta memperkuat identitas kultural masyarakat setempat.

Secara geografis, KWU di Kabupaten Kuningan terkonsentrasi di wilayah selatan dan barat daya yang berada di sekitar kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC). Wilayah ini mencakup destinasi-destinasi strategis seperti Taman Nasional Gunung Ciremai, Palutungan, Curug Putri, Waduk Darma, Pemandian Air Panas Sangkanhurip, serta Desa Wisata Cibuntu, yang telah beberapa kali meraih penghargaan nasional dalam kategori desa wisata berkelanjutan. Selain itu, kawasan Cigugur, Linggarjati, dan sekitarnya menjadi simpul penting wisata sejarah dan budaya, karena menyimpan peninggalan kolonial dan tradisi lokal yang kuat.

Dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPARDA) Kabupaten Kuningan dan dokumen strategi KWU Provinsi Jawa Barat, kawasan ini diarahkan menjadi kawasan wisata terpadu berbasis ekowisata, budaya lokal, dan agrowisata. Strategi pengembangan diarahkan melalui pendekatan spasial dan tematik, yaitu dengan mengembangkan klaster destinasi yang saling terhubung melalui koridor wisata. Misalnya, koridor wisata Cibuntu–Palutungan–Curug Putri dikembangkan sebagai zona ekowisata dan petualangan, sementara koridor Linggarjati–Cigugur–Waduk Darma difokuskan pada wisata sejarah, budaya, dan air.

Dalam kerangka Model Pengembangan KWU, pengembangan kawasan wisata unggulan di Kabupaten Kuningan diintegrasikan dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata, penataan infrastruktur penunjang (akses jalan, fasilitas publik, jaringan informasi), serta kolaborasi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, masyarakat, dan lembaga swadaya

masyarakat. Pendekatan ini menekankan prinsip kolaboratif dan partisipatif dalam pengelolaan kawasan wisata, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan Perda Provinsi Jawa Barat tentang Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP).

Tabel 2.2
Rekapitulasi Data Pengunjung Obyek Wisata Disporapar Kab. Kuningan
Tahun 2022 - 2024

Sumber: Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kab. Kuningan

No	Tahun	Domestik (orang)	Mancanegara (orang)
1	2022	1.627.768	35
2	2023	1.555.151	26
3	2024	1.820.741	144
Jumlah: 2022 - 2024		5.003.660	195

Relevansi pengembangan Kawasan Wisata Unggulan di Kabupaten Kuningan juga didukung oleh indikator-indikator keberhasilan seperti meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan dari tahun 2023-2024 (baik domestik maupun mancanegara) walaupun sempat mengalami penurunan pada tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022, bertambahnya jumlah desa wisata yang aktif, serta tumbuhnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berbasis pariwisata. Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa KWU bukan hanya sebagai kerangka spasial pembangunan destinasi, tetapi juga sebagai model kebijakan implementatif yang menyinergikan aspek sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan dalam satu ekosistem pembangunan pariwisata yang berkelanjutan.

Dengan demikian, KWU Kabupaten Kuningan dapat dilihat sebagai entitas strategis dalam mewujudkan visi besar Jawa Barat sebagai provinsi dengan destinasi wisata kelas dunia. Model Pengembangan KWU memberikan arah yang sistematis, inklusif, dan berkelanjutan, serta dapat dijadikan model

replikasi bagi kabupaten/kota lain yang memiliki karakteristik serupa dalam mengembangkan pariwisata berbasis potensi lokal.

2.2.5. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu komponen penyusun pendapatan daerah yang bersumber dari potensi daerah itu sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan undang-undang tentang keuangan negara, kekuasaan atas pengelolaan kekayaan negara dipisahkan dilaksanakan oleh wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan yang dikuasai oleh menteri keuangan. Sedangkan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan yang dananya bersumber dari APBN, diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selaku kepala daerah.

Menurut Bastian (2001:22) dalam (Fajri, 2018) bahwa penerimaan Pendapatan Asli Daerah merupakan akumulasi dari pos penerimaan pajak berisi Pajak Daerah dan Pos Retribusi Daerah, Pos Penerimaan Non Pajak yang berisi perusahaan milik daerah, Pos Penerimaan Investasi serta pengelolaan Sumber Daya Alam.

Menurut undang-undang nomor 32 tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut keuangan inilah merupakan dalam satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri.

Menurut UU No. 33 tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, terdiri dari:

- a. Pajak daerah
- b. Retribusi daerah
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Peran sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah baik dalam kondisi jangka pendek maupun jangka panjang yang disertai dengan variabel kontrol. Selain itu, beberapa indikator pariwisata membantu memberikan opsi permanen untuk meningkatkan pendapatan daerah. Pada prinsipnya, semakin besar sumbangan PAD kepada APBD akan menunjukkan semakin kecilnya tingkat ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Dalam rangka implementasi UU No. 32 tahun 2004 dan UU No. 33 tahun 2004, maka salah satu faktor yang harus dipersiapkan oleh pemerintah daerah adalah kemampuan keuangan daerah, sedangkan indikator yang dipergunakan untuk mengatur kemampuan keuangan daerah tersebut adalah rasio PAD dibandingkan dengan total penerimaan APBD.

Halim (2004:56) membedakan 2 (dua) faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah suatu daerah, yaitu Faktor Eksternal dan Faktor Internal. Faktor eksternal terdiri dari investasi, inflasi, PDRB dan jumlah penduduk, sedangkan faktor internal terdiri dari sarana prasarana, insentif, penerimaan subsidi, penerimaan pembangunan, sumber daya manusia, peraturan daerah, sistem dan pelaporan. Adapun realisasi Pendapatan Asli daerah (PAD) sektor pariwisata Kabupaten Kuningan Tahun 2023 s.d 2025 adalah sebagai berikut:



Gambar 2.4
Realisasi PAD Sektor Pariwisata Kab. Kuningan tahun 2023 – 2025
Sumber: Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kab. Kuningan 2025

Sementara itu, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kuningan menunjukkan tren pertumbuhan yang stabil dan kuat dalam beberapa tahun terakhir, meskipun tidak ada data dari periode sebelum tahun 2022, angka-angka yang ada sudah cukup menggambarkan kinerja ekonomi yang cukup baik. Pada tahun 2022, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kuningan tercatat sebesar 5,53%. Angka ini mencerminkan pemulihan yang kuat setelah masa sulit yang mungkin terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Kinerja ini menunjukkan bahwa sektor-sektor ekonomi di Kabupaten Kuningan bergerak dengan dinamis dan produktif.

Memasuki tahun 2023, pertumbuhan ekonomi sedikit mengalami penyesuaian, berada di angka 5,25%. Penurunan tipis ini adalah hal yang wajar dalam dinamika perekonomian dan tidak mengurangi optimisme. Angka ini tetap berada di atas 5%, menunjukkan fondasi ekonomi yang masih kokoh dan tidak rentan terhadap gejolak.

Momentun positif kembali meningkat pada tahun 2024, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kuningan berhasil melampaui angka tahun sebelumnya dan

mencapai 5,61%. Kenaikan ini adalah bukti nyata dari keberhasilan kebijakan ekonomi lokal, investasi dan aktivitas produktif masyarakat yang terus bergerak. Secara keseluruhan, tren pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kuningan dari tahun 2022 hingga 2024 menunjukkan kemampuan daerah untuk tidak hanya pulih, tetapi untuk tumbuh secara konsisten dan berkelanjutan.

Secara agregat, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kuningan pada tahun 2024 menunjukkan performa yang sangat impresif, mencapai 5,61%. Angka ini tidak hanya melampaui capaian tahun sebelumnya yang sebesar 2,25%, tetapi juga menegaskan kembali tren pemulihan dan penguatan ekonomi yang telah dimulai sejak tahun 2022. Peningkatan ini didorong oleh kinerja positif hampir seluruh sektor lapangan usaha, yang menunjukkan diversifikasi dan ketahanan ekonomi Kabupaten Kuningan dalam menghadapi berbagai tantangan.

Dilihat menurut lapangan usahanya, kebangkitan ekonomi Kabupaten Kuningan pada tahun 2024 sangat ditopang oleh beberapa sektor utama. Lapangan usaha pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang memimpin pertumbuhan tertinggi, melonjak signifikan hingga 13,36%. Angka ini menunjukkan peningkatan yang stabil dan konsisten jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2023 (13,36%) dan 2022 (12,12%), menandakan sektor ini menjadi salah satu pilar utama pertumbuhan ekonomi daerah.

Selain itu, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum juga menjadi motor penggerak yang kuat, dengan pertumbuhan mencapai 9,99%. Meskipun sedikit melambat dibandingkan dengan puncaknya pada tahun 2023 (12,44%), sektor ini tetap menunjukkan vitalisasi yang luar biasa. Terutama dalam mendorong sektor pariwisata dan jasa. Tren positif juga terlihat pada sektor jasa

keuangan dan asuransi, yang berhasil tumbuh 11,50% pada tahun 2023 dan kembali menguat ke 10,83% di tahun 2024. Terdapat beberapa sektor juga yang memberikan kontribusi signifikan seperti perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor yang tumbuh sebesar 9,17%, serta sektor jasa pendidikan yang tumbuh 7,05%. Angka ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi di Kabupaten Kuningan tidak hanya terpusat pada satu atau dua sektor, melainkan tersebar di berbagai lini.

Namun, di tengah performa yang dominan positif, ada satu sektor yang menjadi catatan penting. Lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan kembali mengalami kontraksi yaitu sebesar -6,41%. Penurunan ini menyoroti tantangan yang masih dihadapi sektor primer di Kuningan dan memerlukan perhatian khusus untuk mengidentifikasi penyebab dan mencari solusi yang tepat agar dapat kembali tumbuh di masa mendatang.

Tabel 2.3
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kuningan tahun 2020 s.d 2024
(persen)

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kuningan

Lapangan Usaha		2020	2021	2022	2023	2024
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1,44	2,34	3,74	2,14	-6,41
B	Pertambangan dan Penggalian	-2,70	12,75	-0,66	1,01	6,66
C	Industri Pengelolaan	1,07	3,34	5,54	4,63	5,83
D	Pengadaan Listrik dan Gas	-1,99	13,34	3,56	3,07	7,30
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8,85	6,39	2,79	2,87	13,36
F	Konstruksi	-7,15	7,02	2,95	5,09	3,01
G	Pengadaan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-3,00	3,58	4,07	4,17	0,32
H	Transportasi dan Pergudangan	-1,51	0,24	12,50	9,99	19,94
I	Penyediaan Akomodasi dan Makanan Minum	-3,82	1,10	12,44	6,95	5,56
J	Informasi dan Komunikasi	24,27	7,09	6,64	7,46	18,08
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,47	5,08	-1,01	4,66	4,11
L	Real Estat	0,34	11,45	5,60	6,45	10,83
M,N	Jasa Perusahaan	-2,83	9,21	11,68	6,89	-6,98
O	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-3,79	-1,60	-1,19	2,54	5,18
P	Jasa Pendidikan	1,69	2,90	6,51	5,44	7,05
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-3,26	7,52	6,00	4,97	6,40
R,S,T,U	Jasa Lainnya	-2,83	0,89	11,20	7,51	10,91
Produk Domestik Regional Bruto		0,11	3,56	5,53	5,25	5,61
* Angka sementara						
**Angka sangat sementara						

Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi merupakan proses peningkatan kapasitas produksi suatu daerah yang tercermin melalui kenaikan pendapatan masyarakat, perluasan lapangan kerja, dan meningkatnya aktivitas sektor-sektor ekonomi produktif. Dalam konteks pembangunan pariwisata, pertumbuhan ekonomi tidak hanya dipahami sebagai kenaikan angka PDRB, tetapi juga

sebagai *multiplier effect* yang ditimbulkan dari kegiatan wisata, termasuk pengembangan destinasi, peningkatan kunjungan wisatawan, dan tumbuhnya usaha-usaha pendukung pariwisata. Secara teoritis, pariwisata dipandang sebagai *leading sector* yang mampu menggerakkan sektor lain seperti perdagangan, transportasi, akomodasi, dan industri kreatif, sehingga berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Peningkatan kunjungan wisatawan memberikan dorongan terhadap perputaran ekonomi lokal, fenomena ini sejalan dengan konsep *multiplier effect*, di mana setiap aktivitas wisata menghasilkan manfaat ekonomi yang meluas ke berbagai sektor lain. Di Kabupaten Kuningan, multiplier effect tersebut terlihat dari semakin berkembangnya UMKM, meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan destinasi, dan tumbuhnya sektor ekonomi kreatif yang berbasis potensi budaya serta kearifan lokal. Oleh karena itu di Kabupaten Kuningan pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan oleh sektor pariwisata masih bersifat *dependent growth*, yaitu pertumbuhan yang bergantung pada volume kunjungan wisatawan.

2.3. Kerangka Pemikiran

Dalam era globalisasi dan digitalisasi saat ini, sektor pariwisata menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang penting, tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga di tingkat daerah. Pemerintah Indonesia, melalui berbagai regulasi dan program strategis, telah menetapkan arah pembangunan pariwisata yang berorientasi pada peningkatan daya saing global, pelestarian budaya, dan keberlanjutan lingkungan. Di tingkat regional, Pemerintah Provinsi Jawa Barat merespons arah pembangunan tersebut dengan mengembangkan konsep Kawasan Wisata Unggulan

(KWU), yang bertujuan untuk menjadikan destinasi-destinasi di wilayahnya mampu memenuhi standar kualitas pariwisata kelas dunia.

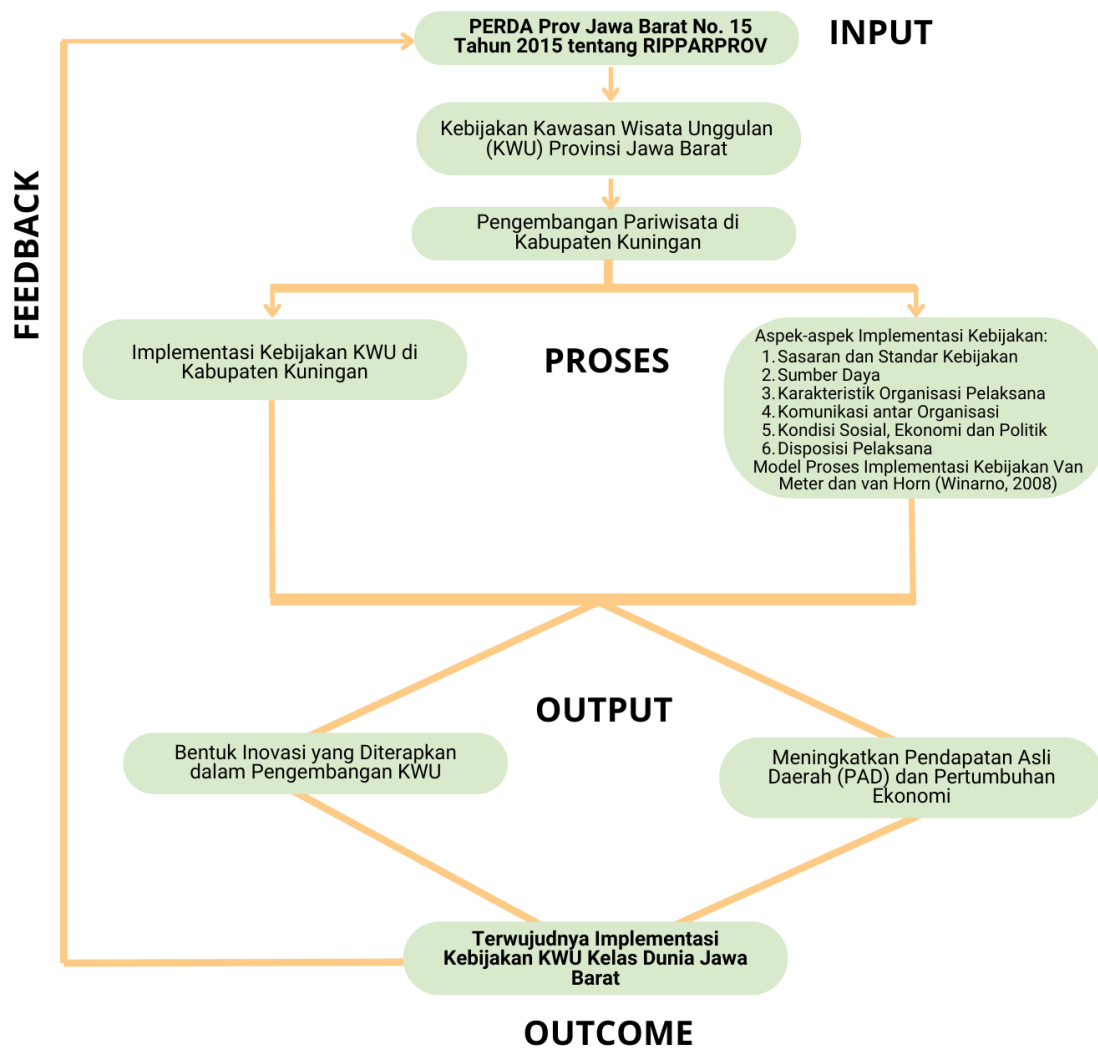
Konsep KWU merupakan pendekatan sistemik yang mengintegrasikan berbagai aspek penting dalam pengembangan destinasi pariwisata, antara lain aspek kebijakan dan regulasi, infrastruktur dan aksesibilitas, sumber daya manusia, promosi dan branding, teknologi informasi, serta pelestarian lingkungan dan budaya lokal. Implementasi KWU tidak hanya menekankan pembangunan fisik destinasi, tetapi juga mencakup penguatan kapasitas kelembagaan, sinergi antar pemangku kepentingan, dan pemberdayaan masyarakat lokal sebagai bagian dari ekosistem pariwisata yang inklusif.

Kabupaten Kuningan merupakan salah satu daerah di Jawa Barat yang memiliki potensi besar dalam pengembangan pariwisata, baik dari segi kekayaan alam, keberagaman budaya, maupun nilai-nilai lokal yang khas. Keberadaan destinasi-destinasi alam seperti pegunungan, air terjun, taman nasional, dan situs-situs budaya menjadikan Kabupaten Kuningan layak dikembangkan menjadi bagian dari kawasan wisata unggulan provinsi. Meskipun demikian, berbagai kendala dan tantangan masih mewarnai implementasi kebijakan KWU di wilayah ini, seperti belum optimalnya pembangunan infrastruktur, keterbatasan kualitas layanan dan SDM pariwisata, lemahnya sistem promosi dan pemasaran digital, serta belum terwujudnya kolaborasi efektif antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat.

Dalam konteks inilah, penelitian ini dirancang untuk merumuskan model pengembangan KWU yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan Kabupaten Kuningan. Penelitian ini berpijak pada pendekatan analisis yang mengkaji hubungan antara kebijakan pengembangan pariwisata kelas dunia, kondisi objektif kawasan wisata di Kuningan, bentuk inovasi yang diterapkan dalam pengembangan Kawasan Wisata Unggulan (KWU) untuk meningkatkan daya tarik destinasi wisata di Kabupaten Kuningan serta mengetahui seberapa besar kontribusi dari Pengembangan Kawasan Wisata Unggulan (KWU) terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Kuningan. Tujuan

akhirnya adalah mengetahui implementasi pengembangan KWU di kabupaten Kuningan, bentuk-bentuk inovasi yang diterapkan serta Pengembangan KWU dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini menggambarkan alur logis dari identifikasi permasalahan, tinjauan kebijakan dan teori pengembangan pariwisata, pemetaan potensi dan tantangan lokal, hingga perumusan model KWU yang berbasis pada kebutuhan riil dan prinsip pembangunan berkelanjutan. Gambar kerangka pemikiran di bawah ini menyajikan hubungan antar variabel dan tahap analisis yang digunakan dalam penelitian ini sebagai landasan untuk menjawab pertanyaan penelitian dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan:



Gambar 2.5.
Kerangka Pemikiran

2.4. Proposisi

Proposisi dalam penelitian ini adalah:

1. Implementasi kebijakan Pengembangan Kawasan Wisata Unggulan (KWU) di Kabupaten Kuningan belum optimal karena dipengaruhi oleh keterbatasan standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, serta komunikasi antar organisasi pelaksana yang belum berjalan secara efektif.
2. Bentuk inovasi yang dikembangkan dalam pengembangan Kawasan Wisata Unggulan (KWU) menuju kelas dunia dilakukan dengan pengembangan inovasi pada seluruh aspek bidang pariwisata.
3. Pengembangan Kawasan Wisata Unggulan (KWU) Kelas Dunia memiliki kontribusi nyata terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kuningan.